



# **RENJA TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOALEMO**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024 Dinas Sosial dan PMD, Renja tahun 2024 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2024 dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dan PMD dapat berjalan dengan baik.

Boalemo, 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD  
KABUPATEN BOALEMO



**Dra MONRU MOPANGGA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19960930 199702 2 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

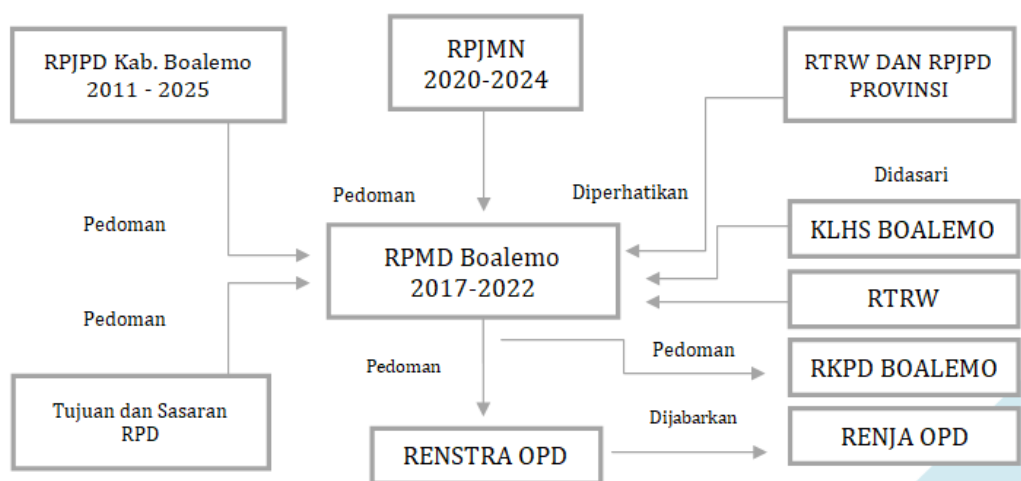
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 pengganti (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Startegi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun

2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Boalemo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024. Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

**Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024** adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Boalemo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024 **dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19*** baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2022 maupun Tahun 2023 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* serta *keterbatasan Penganggaran di tahun sebelumnya* dimasukkan dalam Renja 2024 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. **Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.**



Gambar 1.1

## Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal terdiri dari serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

### **a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial dan PMD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, dan PMD yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Sosial dan PMD;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Sosial dan PMD;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan PMD tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan PMD;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial dan PMD;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial dan PMD ;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Boalemo tahun 2024;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial dan PMD; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial dan PMD.

### **b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial dan PMD;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial dan PMD adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2023-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial dan PMD.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan PMD tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial dan PMD;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dan PMD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan PMD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Sosial dan PMD;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Sosial dan PMD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan PMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD ;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan PMD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan PMD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan PMD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial dan PMD ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial dan PMD;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau

kegiatan untuk Dinas Sosial dan PMD.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Sosial dan PMD. Namun dalam proses ini Dinas Sosial dan PMD mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan Dinas Sosial dan PMD terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD dalam pembangunan daerah.



**i. Penyajian dokumen rancangan Awal Renja Dinas Sosial dan PMD**

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Sosial dan PMD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD;**

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Dinas Sosial dan PMD dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**n. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2012 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
18. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah Tahun 2024 - 2026;
20. Keputusan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024 - 2026.
21. Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2026;

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial dan PMD untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan PMD selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL d a n P M D TAHUN 2022 dan Tahun 2023
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022-2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2023 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial dan PMD sampai dengan tahun **Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial dan PMD Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun Pertama pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan PMD 2023-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan PMD  
s.d Tahun 2023

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2021
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Usuran Wajib Pelayanan Dasar									
Bidang Sosial									
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Tertata dengan Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	- Kali	20 Kali	20 Kali	100	20 Kali	40	2,00
06	09 Penyelenggaraan Rapat	20 Kali	- Kali	20 Kali	20 Kali	100	20 Kali	40	2,00

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100	7 Dok	21	3,00		
08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100	7 Dok	21	3,00		
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>			<b>Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif</b>	<b>70%</b>	<b>50 %</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>167</b>	<b>70%</b>	<b>2,20</b>	<b>3,14</b>		
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	10	2,50		
04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	10	2,50		
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>			<b>Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>40%</b>	<b>106%</b>	<b>20%</b>	<b>73%</b>	<b>365</b>	<b>40%</b>	<b>2,19</b>	<b>5,48</b>		
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133.000 Jiwa	120.293 Jiwa	123.000 Jiwa	89.475 Jiwa	73	133.000 Jiwa	342.768	2,58		

		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150	Org	50	Org	150	Org	25	Org	17	150	Org	225	1,50
13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133.000	Jiwa	120.293	Jiwa	123.000	Jiwa	89.475	Jiwa	73	133.000	Jiwa	342.768	2,58
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150	Org	50	Org	150	Org	25	Org	17	150	Org	225	1,50
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan</b>	<b>100%</b>		<b>84%</b>		<b>100%</b>		<b>103%</b>		<b>103</b>	<b>100%</b>		<b>287%</b>	<b>2,87</b>
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35	Kel.	51	Kel.	35	Kel.	44	Kel.	126	35	Kel.	130	3,71
		Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028	KK	10.914	KK	13.028	KK	13.432	KK	103	13.028	KK	37.374	2,87
01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35	Kel.	51	Kel.	35	Kel.	44	Kel.	126	35	Kel.	130	3,71
02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028	KK	10.914	KK	13.028	KK	13.432	KK	103	13.028	KK	37.374	2,87
<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi</b>	<b>40%</b>		<b>153%</b>		<b>20%</b>		<b>1073%</b>		<b>5.365</b>	<b>40%</b>		<b>12,66</b>	<b>31,65</b>



		<b>Kebutuhan Dasarnya</b>										
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4.000 Jiwa	6.139 Jiwa	4.000 Jiwa	42.938 Jiwa	1.073	4.000 Jiwa	53.077	13,27		
01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4.000 Jiwa	6.139 Jiwa	4.000 Jiwa	42.938 Jiwa	1.073	4.000 Jiwa	53.077	13,27		
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa</b>	<b>70 Desa</b>	<b>82 Desa</b>	<b>65 Desa</b>	<b>82 Desa</b>	<b>126</b>	<b>70 Desa</b>	<b>234</b>	<b>3,34</b>		
		<b>Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa</b>	<b>75%</b>	<b>-</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>143</b>	<b>75%</b>	<b>1,75</b>	<b>2,33</b>		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	3,00	3,00		
		Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	- Org	82 Org	82 Org	100	82 Org	164	2,00		
04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	3,00	3,00		

05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Org	- Org	82 Org	82 Org	100	82 Org	164	2,00
<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>143</b>	<b>75%</b>	<b>2,75</b>	<b>3,67</b>
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100	2 Keg.	6	3,00
09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100	2 Keg.	6	3,00

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian Kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai, adanya kegiatan yang bersifat penyediaan dan Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun terutama terhadap Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) di RENSTRA

Tilamuta, November 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD**



**Dra. MONRU MOPANGGA**

NIP. 19660930 199702 2 002

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Sosial dan PMD Tahun 2023-2026.

Dalam rencana jangka waktu 4 tahun yaitu tahun 2023-2026, akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam pembangunan Urusan Bidang Sosial dan Bidang PMD. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (n-1) yaitu sebagaimana berikut :

**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Sasaran dan Programnya terdiri dari :**

1. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Sasaran dan Programnya terdiri dari :**

2. Sasaran terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
  - b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - d. Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang P3A Programnya terdiri dari :**

- 1) Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :**

3. Sasaran Berkembangnya ekonomi desa, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Namun dalam Hal Perencanaan Pendanaan terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi Perencanaan sesuai Renstra bahkan ada beberapa

program yang melampaui target pendanaan sehingga hal ini mempengaruhi pencapaian Target Program dan Kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, beberapa hal yang di evaluasi adalah :

1. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang Melampaui Target Perencanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Target kinerja capaian program semestinya 100%, namun terealisasi 234.13 % dikarenakan anggaran di drop guna pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor.
2. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang hanya berkisar pada 10.96 % dengan Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan. Target kinerja capaian program semestinya 100%, namun tidak terealisasi dikarenakan Capaian pendanaan 0 %, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin 28.54 % bahkan pada kegiatan monev dan pelaporan hanya berkisar pada 2.51 % sebagai akibat kemampuan Anggaran Daerah yang terbatas
3. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang hanya berkisar pada 27.95 % dengan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan. Target kinerja capaian program semestinya 100%, namun tidak terealisasi dikarenakan Capaian pendanaan 0 %, Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 55.81 % sebagai akibat kemampuan Anggaran Daerah yang terbatas
4. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan maupun melampaui target Pendanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang mencapai 178.6 % dengan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dengan. Target kinerja capaian program semestinya 100%, namun melampaui 651 % disisi lain salah satu kegiatan tidak terealisasi dikarenakan Capaian pendanaan 0 %, yakni pada Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai akibat tidak konsistennya dalam Penentuan prioritas pengalokasian Anggaran

5. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan maupun melampaui target Pendanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS tidak terealisasi dikarenakan Capaian pendanaan 0 %, sebagai akibat tidak konsistennya dalam Penentuan Prioritas pengalokasian Anggaran
6. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan maupun melampaui target Pendanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan tidak terealisasi 100 % dikarenakan Capaian pendanaan 47.34 %, sebagai akibat keterbatasan anggaran
7. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan maupun melampaui target Pendanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0 % dikarenakan Capaian pendanaan 0 %, sebagai Penentuan Prioritas Alokasi anggaran yang tidak konsisten sebagai akibat kurangnya alokasi anggaran
8. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan maupun melampaui target Pendanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa semestinya capaian realisasi kinerja sebesar 100 % namun dikarenakan Capaian pendanaan hanya 37.50 %, sebagai akibat kurangnya alokasi anggaran
9. Realisasi Pendanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Perencanaan maupun melampaui target Pendanaan mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa semestinya capaian realisasi kinerja

sebesar 100 % namun dikarenakan Capaian pendanaan hanya 0.12 %, sebagai akibat kurangnya alokasi anggaran

10. Demikian juga untuk program/kegiatan di tahun 2022 yang saat ini berjalan beberapa program tidak memenuhi Target Perencanaan Pendanaan hal ini sangat mempengaruhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai akibat pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid 19/
11. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
12. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan adalah untuk di tahun selanjutnya yaitu tahun 2024 untuk diadakan kembali program/kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2021 maupun tahun 2022 di prioritaskan pada pemenuhan target kinerja program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2022 dan saat sedang berjalan terdiri dari

**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Sasaran dan Programnya terdiri dari :**

1. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Sasaran dan Programnya terdiri dari :**

2. Sasaran **Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial** yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
  - b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - d. Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang P3A Programnya terdiri dari :**

Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :**

3. Sasaran Berkembangnya ekonomi desa, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan PMD**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan PMD dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:



Tabel. 2.2

## Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo

No	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (5)	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	4	7		12		13 = 6+12		14=13/5x100%	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	<b>Persentase Administrasi Tertata Dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>877.587.040</b>	<b>100,00%</b>	<b>860.849.669</b>	<b>200%</b>	<b>1.916.997.992</b>	<b>400%</b>	<b>6,40</b>
1	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	221.264.000	20 Kali	219.387.607	40 Kali	578.618.907	200%	2,31
2	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok.	656.323.040	7 Dok.	641.462.062	14 Dok.	1.338.379.085	200%	4,47
	<b>Persentase Lembaga Sosial Masyarakat Yang Aktif</b>	<b>70%</b>	<b>126.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>126.000.000</b>	<b>200%</b>	<b>234.000.000</b>	<b>200%</b>	<b>1,03</b>
3	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	126.000.000	4 Kali	126.000.000	8 Kali	234.000.000	200%	1,03
	<b>Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>40%</b>	<b>673.514.350</b>	<b>65%</b>	<b>651.745.059</b>	<b>155%</b>	<b>813.140.059</b>	<b>344%</b>	<b>4,07</b>
4	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	133.000 Jiwa	673.514.350	65.052 Jiwa	651.745.059	154.527 Jiwa	813.140.059	108%	8,13
5	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) <b>Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan</b>	150 Orang <b>100%</b>	- <b>421.921.000</b>	30 Orang <b>165%</b>	- <b>419.076.000</b>	55 Orang <b>394%</b>	- <b>1.093.497.500</b>	37% <b>394%</b>	- <b>0,41</b>
6	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kelm.	390.080.000	23 Kelm.	387.235.000	67 Klmpk	1.061.656.500	191%	0,77

7	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028 KK	31.841.000	12.936 KK	31.841.000	26.368 KK	31.841.000	202%	0,03
	<b>Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>40%</b>	<b>30.667.500</b>	<b>118%</b>	<b>21.108.000</b>	<b>1191%</b>	<b>4.359.238.650</b>	<b>2647%</b>	<b>21,00</b>
8	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4000 Jiwa	30.667.500	4.713 Jiwa	21.108.000	47.651 Jiwa	4.359.238.650	1162%	21,00
	<b>Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDEs dan Menyertakan Modal dari Dana Desa</b>	<b>70 Desa</b>	<b>100.630.000</b>	<b>82 Desa</b>	<b>97.910.000</b>	<b>82 Desa</b>	<b>168.295.000</b>	<b>100%</b>	<b>1,24</b>
	<b>Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa</b>	<b>75%</b>	<b>56.070.000</b>	<b>-</b>	<b>740.000</b>	<b>-</b>	<b>740.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
9	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	100.630.000	100%	97.910.000	200%	168.295.000	200%	1,24
10	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	82 Orang	56.070.000	-	740.000	-	740.000	-	0,00
	<b>Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat</b>	<b>75%</b>	<b>217.465.000</b>	<b>100%</b>	<b>214.064.500</b>	<b>200%</b>	<b>345.836.700</b>	<b>250%</b>	<b>0,72</b>
11	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	217.465.000	2 Keg.	214.064.500	4 Keg.	345.836.700	200%	0,72

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian Kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja

: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai, adanya kegiatan yang bersifat penyediaan dan Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun terutama terhadap Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPMD) di RENSTRA

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai atau melampaui terdiri dari:
  - a. Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
  - b. Jumlah Dokumen Administrasi Kantor
  - c. Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sosial
  - d. Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat
  - e. Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE
  - f. Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan
  - g. Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial
  - h. Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
  - i. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai terdiri dari:
  - a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  - b. Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah antara lain Ketersediaan SDM dan jejaring sosial baik dari tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten dalam pelaksanaan Pelayanan untuk pencapaian target Program dan Kegiatan serta dari sisi perencanaan dan penganggaran terdapat alokasi anggaran, disamping itu Indikator diantaranya merupakan indicator SPM yang harus terpenuhi 100 persen dalam penanganan
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dari 2 indikator yang belum terpenuhi diatas yang menjadi kendala adalah terbatasnya alokasi anggaran sehingga mempengaruhi pencapaian Target Kinerja Masih terjadinya ketidaktepatan dalam penentuan Prioritas Pendanaan dan Alokasi anggaran,

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dalam hal penentuan Prioritas Pengalokasian anggaran harus lebih selektif dengan menetapkan Prioritas Anggaran untuk pencapaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

**Adapun dasar hukum jenis pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :**

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional serta Realisasi nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Boalemo Tahun 2021 adalah 100,00% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada table di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial**  
**Kabupaten Boalemo Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahapan Pencapaian	Capaian Kabupaten		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2021	100 %	100 %	100 %
		Persentase(%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2021	100 %	100 %	100 %

	di Luar Panti Sosial	Persentase(%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diLuar Panti Sosial				
3	Rehabilitasi SosialDasar Lanjut Usia Terlantar di LuarPanti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2021	100 %	100 %	100 %
		Persentase(%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diLuar Panti Sosial				
4	Rehabilitasi SosialDasar Tuna Sosial khususnyaGel andangan dan Pengemisdi LuarPanti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2021	-	-	-
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diLuar Panti Sosial				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kab/Kota	2021	100 %	100 %	100 %
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan				

	Kabupaten/Kota	Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota				
<p>Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Boalemo</p>						<p>100%</p>

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Tabel 2.4  
Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM  
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Boalemo

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
I	APBD	
1	Program Rehabilitasi Sosial	673.514.350,-
2	Program Penanganan Bencana	30.667.500,-
<b>Jumlah</b>		<b>704.181.850,-</b>

### 4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

- a. PNS = 35 Orang
- b. Non PNS = 23 Orang

### 5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana yang sangat terbatas sangat mempengaruhi pencapaian Target Kinerja sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- Keterbatasan Alokasi anggaran dan Penentuan Alokasi Anggaran yang belum berdasarkan prioritas

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi**

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, didasarkan pada data dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan PMD adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan keluarga miskin dengan meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
2. Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada pengembangan kemandirian melalui peningkatan keterampilan dan penguatan akses bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) dalam memanfaatkan sistim sumber;
3. Masih rendahnya pengetahuan aparat terkait administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan;
4. Adanya peningkatan permasalahan - permasalahan sosial terutama masalah kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan dan masalah bencana sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah,



- masyarakat dan pelaku dunia usaha;
5. Kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat miskin dalam berusaha sehingga sulit untuk memperbaiki ekonomi keluarganya;
  6. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak yang bisa diakomodir oleh pemerintah dalam penanganannya;
  7. Memantapkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di Desa;
  8. Memantapkan profil Desa sebagai basis data pelaksanaan pembangunan;
  9. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam mengembangkan gotong royong;
  10. Mendorong dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam;
  11. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pada Dinas Sosial dan PMD yang masih sangat terbatas.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2024 dengan Rancangan Awal Renja PD Dinas Sosial dan PMD. Hasil Review dapat digambarkan pada lampiran dalam dokumen ini.

#### **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Sosial dan PMD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

## Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
I	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Wonosari, Kecamatan Botumoito	Peningkatan jumlah dan Besaran Insentif	1 Tahun	usulan Musrenbang

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yang sasarannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi Dinas Sosial dan PMD yang dilakukan dan dilaksanakan Dinas Sosial dan PMD dalam 3 (tiga) tahun terakhir antara lain :

Tabel 2.6

## Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2017-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Universal Health Coverage (UHC)	Dinsos PMD Kecamatan, Masyarakat desa	APBD 1 APBD II APBN	Sebagai bentuk Pelayanan Jaminan Perlindungan sosial kesehatan Menyeluruh Kepada Masyarakat Miskin	Peraturan Bupati	Perlindungan Sosial berupa Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Miskin	Dinsos – 2022 Dikes 2022
2	Pilkades E-Voting	Dinsos PMD, Tim Kabupaten, Kecamatan dan Desa	APBD DD	Sebuah inovasi yang untuk Meminimalisir Permasalahan	Peraturan Bupati	Pelaksanaan Pemilihan Pilkades	Dinsos PMD – Tim Kabupaten, Kecamatan

				han terkait dengan Pemilihan Kepala Desa			an dan Tim Desa
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo maupun oleh dinas Sosial dan PMD melalui Dinas Siosial dan PMD ada 2 Penghargaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7

### Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	KAtegori SOPD Terbaik Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Dan PAD	Bupati	Kabupaten	Dinsos
2.	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Kepala BPJS	Nasional	Dinsos/Pemda

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial dan PMD lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo.

Untuk urusan bidang Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk SDG's, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem.

Disamping mendukung SPM dan SDG's, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Jamkesda.

Untuk urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD ) yang mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah : ***“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

#### **Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024**

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan

4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul, dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

### **Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa, melalui indikator :
  - Jumlah desa mandiri
  - Jumlah desa berkembang
  - Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), melalui indikator :
  - Nilai rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian, melalui indikator :
  - Nilai rata-rata indeks perkembangan N/A Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan, melalui indikator :
  - Persentase penurunan angka kemiskinan
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui indikator :
  - Jumlah Bumdes berkembang
  - Jumlah Bumdes maju
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), melalui indikator :
  - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang
  - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi, melalui indikator :

- Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan
- 8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan, melalui indikator :
  - Penyerapan tenaga kerja perdesaan
- 9. Terentaskannya daerah tertinggal, melalui indikator :
  - Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
- 10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, melalui indikator :
  - Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
- 11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal, melalui indikator :
  - Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
- 12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, melalui indikator :
  - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
- 13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi, melalui indikator :
  - Nilai rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
- 14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan, melalui indikator :
  - Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
  - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
- 15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan, melalui indikator :
  - Nilai Reformasi Birokrasi
- 16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian, melalui indikator :
  - Nilai Laporan Pengelolaan Keuangan
- 17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi, melalui indikator :
  - Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial dan PMD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD yang dikaitkan

dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Boalemo tahun 2024.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Boalemo dan isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari urusan sosial dan PMD adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan dalam Aspek Jasmani, Rohani dan Sosial
4. Meningkatkan pelayanan kebencanaan baik bencana alam dan sosial
5. Mengembangkan perekonomian perdesaan

Dengan sasaran adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan public
2. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan dalam Aspek Jasmani, Rohani dan Sosial
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar baik sebelum atau sesudah terkait bencana alam dan sosial
5. Tertatanya penataan desa dan administrasi desa
6. Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024-2026.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan dan akan Di perbandingan / Disingkronisasikan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali.



Perubahan yang terjadi lebih pada Penambahan pagu indikatif di Tahun 2024 yang diprioritaskan pada pemenuhan Program dan Kegiatan yang ditahun sebelumnya belum memenuhi target serta untuk pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) .

Adapun analisa kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rancangan Awal Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**A. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin**

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

**1. Program Pemberdayaan Sosial. Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
  1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
  2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
2. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

**B. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

**1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  1. Penyediaan Permakanan
  2. Penyediaan Sandang
  3. Penyediaan Alat Bantu
  4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  8. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  10. Pemberian Layanan Kedaruratan
  11. Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga
  12. Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  2. Pemberian Layanan Kedaruratan
  3. Penyediaan Permakanan
  4. Penyediaan Sandang
  5. Penyediaan Alat Bantu
  6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
  7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
  9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  10. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  13. Pemberian Layanan Rujukan
  14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

**C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
  2. Rujukan Anak-Anak Terlantar

3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
  4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

### **3. Program Penanganan Bencana**

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  1. Penyediaan Makanan
  2. Penyediaan Sandang
  3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
  4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
  5. Pelayanan Dukungan Psikososial
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
  2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

## **D. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal**

Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal meliputi :

### **1. Program Penataan Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Penyelenggaraan Penataan Desa
  1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
  2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
  3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
  4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
  5. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
  6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

### **2. Program Peningkatan Kerjasama Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
  1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

**3. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan dan Sub Kegiatannya terdiri dari :**

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
  3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
  8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
  9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  12. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
  13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
  14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
  15. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
  16. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

**E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan dan Sub Kegiatannya terdiri dari :**

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Program /Kegiatan, Indikator Kinerja Target Kinerja Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2024

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Program /Kegiatan, Indikator Kinerja Target Kinerja  
Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2024

MISI	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudka n Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatn ya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.776.057.100</b>	<b>100%</b>	<b>15.104.228.400</b>
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.025.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.100.000</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	8 Dokume n	375.000	35 Dokume n	1.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokume n	375.000	20 Dokume n	1.500.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokume n	275.000	16 Dokume n	1.100.000
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan yang tepat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.434.385.010</b>	<b>100%</b>	<b>13.737.540.040</b>

Daerah	waktu					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	3.432.885.010	35 Orang	13.731.540.040
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.500.000	72 Laporan	6.000.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>750.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	750.000	56 Laporan	3.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>27.250.000</b>	<b>100%</b>	<b>109.000.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	4 Paket	80.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	1.250.000	25 Dokumen	5.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	34 Orang	6.000.000	34 Orang	24.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>122.647.090</b>	<b>100%</b>	<b>490.588.360</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6 Paket	7.500.000	24 Paket	30.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	75 Laporan	115.147.090	445 Laporan	460.588.360

	SKPD					
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	-	<b>100%</b>	<b>141.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>566.000.000</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 unit	125.000.000	7 Unit	500.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Paket	1.500.000	20 Paket	6.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	15.000.000	14 Unit	60.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	-	<b>100%</b>	<b>20.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>82.000.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4 Laporan	500.000	16 Laporan	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3 Laporan	15.000.000	12 Laporan	60.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	5.000.000	48 Laporan	20.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>112.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	2.500.000	40 Unit	10.000.000



		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	2.500.000	40 Unit	10.000.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Buah	15 Buah	1.500.000	60 Buah	6.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	1.500.000	60 Unit	6.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Buah	2 Buah	20.000.000	2 Buah	80.000.000
Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan dalam Aspek Jasmani, Rohani dan Sosial	Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan dalam Aspek Jasmani, Rohani dan Sosial	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						
		<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>126.321.400</b>	<b>100%</b>	<b>511.711.300</b>
		<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 KK	189 KK	25.000.000	189 KK	100.000.000
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	0	3 Orang	-
		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	<b>2 Kali</b>	<b>10 Kali</b>	<b>1.321.400</b>	<b>40 Kali</b>	<b>11.711.300</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	2 Dok.	10 Dok.	1.321.400	40 Dok.	11.711.300

		Pengumpulan Uang atau Barang	Pengumpulan Uang atau Barang					
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Kali</b>	<b>2 Kali</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2 Kali</b>	<b>400.000.000</b>
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	100.000.000	2 Lembaga	400.000.000
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>252.938.400</b>	<b>100%</b>	<b>1.024.619.950</b>
		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya</b>	<b>86 Orang</b>	<b>17 Orang</b>	<b>164.938.400</b>	<b>86 Orang</b>	<b>672.619.950</b>
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	86 Orang	17 Orang	20.400.000	86 Orang	81.600.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	86 Orang	17 Orang	13.038.400	86 Orang	65.019.950
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	163 Orang	32 Orang	22.000.000	163 Orang	88.000.000

	Sesuai kebutuhan					
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	86 Orang	17 Orang	20.000.000	86 Orang	80.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	86 Orang	17 Orang	17.500.000	86 Orang	70.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	86 Orang	17 Orang	20.000.000	86 Orang	80.000.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	50 Orang	10 Orang	7.500.000	50 Orang	30.000.000
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	4 Orang	5.000.000	20 Orang	20.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	10 Orang	2 Orang	5.500.000	10 Orang	22.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	5 Orang	1 Orang	14.000.000	5 Orang	56.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	5 Orang	1 Orang	10.000.000	5 Orang	40.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	10 Orang	2 Orang	10.000.000	10 Orang	40.000.000

<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>326 Orang</b>	<b>65 Orang</b>	<b>88.000.000</b>	<b>326 Orang</b>	<b>352.000.000</b>
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	326 Orang	65 Orang	5.000.000	326 Orang	20.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	5 Orang	1 Orang	5.000.000	5 Orang	20.000.000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	326 Orang	65 Orang	15.000.000	326 Orang	60.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	326 Orang	65 Orang	10.000.000	326 Orang	40.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	163 Orang	32 Orang	10.000.000	163 Orang	40.000.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	326 Orang	65 Orang	5.000.000	326 Orang	20.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	326 Orang	65 Orang	10.000.000	326 Orang	40.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	326 Orang	65 Orang	10.000.000	326 Orang	40.000.000

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	5 Orang	1 Orang	3.000.000,00	5 Orang	12.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5 Orang	1 Orang	3.000.000	5 Orang	12.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	5 Orang	1 Orang	3.000.000	5 Orang	12.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5 Orang	1 Orang	3.000.000	5 Orang	12.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	5 Orang	1 Orang	3.000.000	5 Orang	12.000.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	3.000.000	3 Orang	12.000.000
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>599.108.600</b>	<b>100%</b>	<b>2.426.909.600</b>
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>5 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	<b>38.598.600</b>	<b>5 Orang</b>	<b>154.267.286</b>
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	5 Orang	1 Orang	15.000.000	5 Orang	60.000.000
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	5 Orang	1 Orang	15.000.000	5 Orang	60.000.000
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	5 Orang	1 Orang	8.598.600	5 Orang	34.267.286

		Terlantar						
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik</b>	<b>9351 KK</b>	<b>9351 KK</b>	<b>560.510.000</b>	<b>9351 KK</b>	<b>2.272.642.314</b>
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 KK	9351 KK	40.000.000	9351 KK	175.616.081
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 KK	9351 KK	93.510.000	9351 KK	389.026.233
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9351 KK	9351 KK	402.000.000	9351 KK	1.608.000.000
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	10 Orang	25.000.000	10 Orang	100.000.000
Meningkatkan pelayanan kebencanaan baik bencana alam dan sosial	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar baik sebelum atau sesudah terkait bencana alam dan sosial	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>212.558.700</b>	<b>100%</b>	<b>861.047.050</b>
		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>177.558.700</b>	<b>100%</b>	<b>721.047.050</b>
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	4682 Orang	70.230.000	4682 Orang	280.920.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa	4682 Orang	4682 Orang	50.000.000	4682 Orang	200.000.000

			Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana						
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian	7 Kec.	1 Kec.	17.328.700	7 Kec.	80.127.050
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50 Orang	50 Orang	15.000.000	50 Orang	60.000.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	4682 Orang	4682 Orang	25.000.000	4682 Orang	100.000.000
			<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana</b>	<b>7 Kali</b>	<b>7 Kali</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7 Kali</b>	<b>140.000.000</b>
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3 Kec.	3 Kec.	15.000.000	3 Kec.	60.000.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	135 Orang	135 Orang	20.000.000	135 Orang	80.000.000
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang Amanah	Mengembangkan Perekonomian Perdesaan	Tertatanya penataan desa dan administrasi desa	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
		Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Tertata secara Representatif</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>181.555.600</b>	<b>100%</b>	<b>705.457.700</b>
			<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik</b>	<b>-</b>	<b>2 Desa</b>	<b>181.555.600</b>	<b>16 Desa</b>	<b>705.457.700</b>

	lembaga kemasyarakatan	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-	2 Desa	50.000.000	8 Desa	200.000.000
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-	2 Desa	50.000.000	16 Desa	203.000.000
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-	3 Desa	25.000.000	22 Desa	101.588.431
		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	1 Desa	15.000.000	4 Desa	45.000.000
		Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	15.000.000	6 Laporan	45.000.000
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	-	2 Buah	26.555.600	15 Buah	110.869.269
		<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>N/A</b>	<b>2,4%</b>	<b>202.606.000</b>	<b>9,8%</b>	<b>616.887.107</b>
		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi</b>	<b>-</b>	<b>2 Desa</b>	<b>202.606.000</b>	<b>8 Desa</b>	<b>616.887.107</b>
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	32.606.000	9 Dokumen	133.424.033
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	80.000.000
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	2 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	403.463.074
		<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>479.481.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.524.389.891</b>



		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	-	<b>82 Desa</b>	<b>479.481.000</b>	<b>82 Desa</b>	<b>2.524.389.891</b>
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	10 Dokumen	40.000.000	82 Dokumen	160.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	-	82 Dokumen	30.000.000	82 Dokumen	200.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	82 Dokumen	35.000.000	82 Dokumen	140.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	-	82 Dokumen	50.000.000	82 Dokumen	224.389.891
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	112 Orang	40.000.000	604 Orang	160.000.000
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	82 Laporan	25.000.000	82 Laporan	100.000.000
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	82 Laporan	20.000.000	82 Laporan	400.000.000
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	140.000.000
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	2 Laporan	35.000.000	13 Laporan	140.000.000

		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	1 Laporan	25.000.000	8 Laporan	100.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	-	82 Dokumen	50.000.000	82 Dokumen	200.000.000
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	2 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	40.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	-	10 Dokumen	35.000.000	55 Dokumen	140.000.000
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	82 Orang	30.000.000	82 Orang	120.000.000
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	82 Laporan	19.481.000	82 Laporan	200.000.000
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	10 Dokumen	15.000.000	82 Dokumen	60.000.000
		<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>282.129.600</b>	<b>100%</b>	<b>1.142.869.800</b>
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang</b>	<b>Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi</b>	-	<b>1 Lembaga</b>	<b>282.129.600</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>1.142.869.800</b>

		<b>Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	3 Lembaga	25.000.000	18 Lembaga	100.000.000
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	2 Buah	17.000.000	13 Buah	75.057.166
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	5 Dokumen	30.000.000	43 Dokumen	120.000.000
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	2 Laporan	20.000.000	7 Laporan	80.000.000

		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	2 Dokumen	30.000.000	8 Dokumen	120.000.000
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	2 Dokumen	160.129.600	8 Dokumen	647.812.634

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boalemo masih akan mengalami kehidupan yang cukup berat dikarenakan dampak dari bencana Covid 19 yang sangat signifikan menyebabkan munculnya masyarakat miskin baru dan rentan miskin sebagai dampak terjadinya bencana Covid yang hampir berpengaruh di semua sektor. Situasi yang berat tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial dan PMD untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial dan PMD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dan PMD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Boalemo yang di dasarkan pada Program dan Tujuan Strategis yang telah direncanakan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2024 ini, maka harapan yang telah direncanakan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai melampaui target dan dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Boalemo, 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD  
KABUPATEN BOALEMO



**Dra MONDRU MOPANGGA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660930 199702 2 002

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Boalemo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1	06	Bidang Sosial												
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	0%	0%	0%	0%	-				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	0%	0%	0%	0%	-				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0%	- Dokumen	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0%	- Dokumen	-				
1	06	01	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	0%	0%	100%	0%	0%	-	
1	06	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	- Orang	-
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	- Laporan	-

						<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	- Laporan	-	-
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	- Paket	- Paket	- Paket	0%	- Paket	-	-
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0%	- Dokumen	-	-
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	- Orang	-	-
1	06	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	- Paket	- Paket	- Paket	0%	- Paket	-	-
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	75 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	- Laporan	-	-
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	-	-
1	06	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	- Laporan	-	-
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	- Laporan	-	-



						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	-	-
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	-	-
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Buah	- Buah	- Buah	- Buah	0%	- Buah	-	-
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	-	-
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>				<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
						<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>0.80</b>
						Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 Keluarga	- Keluarga	- Keluarga	- Keluarga	0%	- Keluarga	-	-
						Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Keluarga	- Keluarga	- Keluarga	- Keluarga	0%	- Keluarga	-	-
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Kali</b>	<b>- Kali</b>	<b>- Kali</b>	<b>- Kali</b>	<b>0%</b>	<b>4 Kali</b>	<b>4</b>	<b>2.00</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0%	1 Lembaga	3	1.50
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>				<b>Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>20%</b>	<b>106%</b>	<b>35%</b>	<b>73%</b>	<b>208</b>	<b>40%</b>	<b>219%</b>	<b>10.94</b>

1	06	04	2			<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</b>	<b>17 Orang</b>	<b>- Orang</b>	<b>- Orang</b>	<b>- Orang</b>	<b>0%</b>	<b>- Orang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi	17 Orang	- Orang	150 Orang	45 Orang	0%	150 Orang	195	11.47
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	17 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	150 Orang	150	8.82
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	32 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	150 Orang	150	4.69
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	150 Orang	150	8.82
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	150 Orang	150	8.82
1	06	04	2	01	06	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	150 Orang	150	150.00
1	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	2 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	- Orang	-	-
1	06	05	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			<b>Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>20%</b>	<b>83.94%</b>	<b>100%</b>	<b>103.16%</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>	<b>287%</b>	<b>14.36</b>	
1	06	05	2	02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik</b>	<b>9351 KK</b>	<b>- KK</b>	<b>- KK</b>	<b>- KK</b>	<b>0%</b>	<b>13028 KK</b>	<b>13,028</b>	<b>1.39</b>	
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	- Orang	-	-
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 Keluarga	- Keluarga	- Keluarga	- Keluar ga	0%	- Keluar ga	-	-

1	06	05	2	02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9351 Keluarga	- Keluarga	13.028 Keluarga	12.936 Keluarga	0%	13.028 Keluarga	25.964	0.00
1	06	05	2	02	02	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0%	- Orang	-	-
1	06	06	Program Penanganan Bencana			Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	153%	40%	1073%	2684%	45%	12.719	12.72	
1	06	06	2	01	01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	20%	153%	40%	1073%	2684%	45%	12.719	63.60
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	6.139 Jiwa	4.000 Jiwa	4713 Jiwa	117,825	4.000 Jiwa	4,723	1.01
2						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	13					Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	122.56%	100%	122.56%	123%	100%	345%	3.45	
2	13	04	2	01	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	100%	82 Desa	246	3.00
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	100%	82 Dokumen	246	3.00
2	13	04	2	01	04	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang	- Orang	82 Orang	- Orang	0%	82 Orang	82	0.73
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen	82 Dokumen	70 Dokumen	82 Dokumen	117%	82 Dokumen	246	35.14

2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	40%	75%	40%	53%	80%	2	1.60		
2	13	05	2	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	1 Lembaga	- Lembaga	- Lembaga	- Lembaga	0%	- Lembaga	-		
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	- Lembaga	- Lembaga	- Lembaga	0%	- Lembaga	-		
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6	3.00

Tilamuta, Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD  
  
**Drs. MONRU MOPANGGA**  
 NIP. 19660930 199702 2 002

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Boalemo**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- -	- -	- -	8 Dokumen	11 Dokumen	- -	- -	8 Dokumen	11 Dokumen	
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- -	- -	- -	5 Dokumen	5 Dokumen	- -	- -	5 Dokumen	5 Dokumen	
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- -	- -	- -	35 Orang	35 Orang	- -	- -	35 Orang	35 Orang	
4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	- -	- -	- -	18 Laporan	18 Laporan	- -	- -	18 Laporan	18 Laporan	
5	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	- -	- -	- -	14 Laporan	14 Laporan	- -	- -	14 Laporan	14 Laporan	
6	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- -	- -	- -	1 Paket	1 Paket	- -	- -	1 Paket	1 Paket	
7	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	- -	- -	- -	5 Dokumen	6 Dokumen	- -	- -	5 Dokumen	6 Dokumen	
8	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- -	- -	- -	34 Orang	34 Orang	- -	- -	34 Orang	34 Orang	
9	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- -	- -	- -	6 Paket	6 Paket	- -	- -	6 Paket	6 Paket	

10	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	-	-	75 Laporan	120 Laporan	-	-	-	75 Laporan	120 Laporan
11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	5 Unit	3 Unit	-	-	-	5 Unit	3 Unit
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan
14	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	-	-	-	10 Unit	10 Unit
15	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	-	-	-	10 Unit	10 Unit
16	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	15 Buah	15 Buah	-	-	-	15 Buah	15 Buah
17	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	-	-	-	15 Unit	15 Unit
18	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	-	-	-	-	-	189 Keluarga	189 Keluarga	-	-	-	189 Keluarga	189 Keluarga
19	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	3 Keluarga	3 Keluarga	-	-	-	3 Keluarga	3 Keluarga
20	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	
21	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	-	-	-	150 Orang	150 Orang	17 Orang	34 Orang	45 Orang	376 Orang	376 Orang	17 Orang	34 Orang
22	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	-	-	-	-	-	17 Orang	34 Orang	-	-	3 Orang	17 Orang	34 Orang
23	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	-	-	-	-	-	32 Orang	65 Orang	-	-	1 Orang	32 Orang	65 Orang

24	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-	-	17 Orang	34 Orang	-	-	5 Orang	17 Orang	34 Orang
25	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	-	-	-	-	17 Orang	34 Orang	-	-	2 Orang	17 Orang	34 Orang
26	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	-	-	1 Orang	2 Orang	-	-	2 Orang	1 Orang	2 Orang
27	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	-	-	-	-	-	2 Orang	4 Orang	-	-	-	2 Orang	4 Orang
28	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-	-	-	-	-	9351 Orang	9351 Orang	-	-	-	9351 Orang	9351 Orang
29	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	9351 Keluarga	9351 Keluarga	-	-	-	9351 Keluarga	9351 Keluarga
30	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	13.028 Keluarga	13.028 Keluarga	9351 Keluarga	9351 Keluarga	12.94 Keluarga	17.313 Keluarga	9351 Keluarga	9351 Keluarga	9351 Keluarga
31	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	-	-	-	10 Orang	10 Orang
32	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	-	-	-	4,000 Jiwa	4,000 Jiwa	4682 Orang	4682 Orang	4713 Jiwa	10444 Jiwa	4682 Orang	4682 Orang	4682 Orang
33	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen
34	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	-	-	82 Orang	82 Orang	112 Orang	164 Orang	- Orang	82 Orang	112 Orang	164 Orang	164 Orang
35	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	-	-	70 Dokumen	82 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
36	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	3 Lembaga	5 Lembaga	-	-	-	3 Lembaga	5 Lembaga

37	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
----	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Tilamuta, 2023

**KERALA DINAS SOSIAL DAN PMD**  
  
**Dra. MONRU MOPANGGA**  
 NIP. 19660930 199702 2 002



**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
	<b>Bidang Sosial</b>					<b>Bidang Sosial</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	3,776,057,100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	3,776,057,100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	1,025,000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	1,025,000	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	375,000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	375,000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	375,000	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	375,000	
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	275,000	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	275,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	3,434,385,010	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	3,434,385,010	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,432,885,010	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,432,885,010	

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1,500,000		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1,500,000	
	3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Dan PMD	<b>Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu</b>	100%	750,000		3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Dan PMD	<b>Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu</b>	100%	750,000	
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	750,000		1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	750,000	
	4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Dan PMD	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>	100%	27,250,000		4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Dan PMD	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>	100%	27,250,000	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20,000,000		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20,000,000	
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1,250,000		2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1,250,000	
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	6,000,000		3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	6,000,000	
	5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Dan PMD	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor</b>	100%	122,647,090		5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Dan PMD	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor</b>	100%	122,647,090	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7,500,000		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7,500,000	
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	115,147,090		2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	115,147,090	

6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>100%</b>	<b>141,500,000</b>	6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>100%</b>	<b>141,500,000</b>	
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	125,000,000		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	125,000,000	
	2	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1,500,000		2	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1,500,000	
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,000,000		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,000,000	
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>100%</b>	<b>20,500,000</b>	7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>100%</b>	<b>20,500,000</b>	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500,000		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500,000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15,000,000		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15,000,000	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000	
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>28,000,000</b>	8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>28,000,000</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2,500,000		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2,500,000	

	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2,500,000		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2,500,000	
	3	Pemeliharaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Buah	1,500,000		3	Pemeliharaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Buah	1,500,000	
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1,500,000		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1,500,000	
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Buah	20,000,000		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Buah	20,000,000	
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>126,321,400</b>		<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>126,321,400</b>	
	<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>		<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	
	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 KK	10,000,000		1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 KK	10,000,000	
	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	15,000,000		2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	15,000,000	
	<b>2</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	<b>10 Kali</b>	<b>1,321,400</b>		<b>2</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	<b>10 Kali</b>	<b>1,321,400</b>	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dok.	1,321,400		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dok.	1,321,400	

1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		7 Kec.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	100,000,000	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		7 Kec.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	100,000,000
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	2 Lembaga	100,000,000		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	2 Lembaga	100,000,000
3	Program Rehabilitasi Sosial		Desa se Kab. Boalemo	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20%	252,938,400	Program Rehabilitasi Sosial		Desa se Kab. Boalemo	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20%	252,938,400	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Desa se Kab. Boalemo	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17 Orang	164,938,400	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Desa se Kab. Boalemo	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17 Orang	164,938,400
	1	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	17 Orang	20,400,000		1	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	17 Orang	20,400,000
	2	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	17 Orang	13,038,400		2	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	17 Orang	13,038,400
	3	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	32 Orang	22,000,000		3	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	32 Orang	22,000,000
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17 Orang	20,000,000		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17 Orang	20,000,000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	17 Orang	17,500,000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	17 Orang	17,500,000		

	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17 Orang	20,000,000		6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17 Orang	20,000,000	
	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	7,500,000		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	7,500,000	
	8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4 Orang	5,000,000		8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4 Orang	5,000,000	
	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	2 Orang	5,500,000		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	2 Orang	5,500,000	
	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	14,000,000		10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	14,000,000	
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	10,000,000		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	10,000,000	
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	2 Orang	10,000,000		12	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	2 Orang	10,000,000	
	2	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Desa se Kab. Boalemo	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>65 Orang</b>	<b>88,000,000</b>		2	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Desa se Kab. Boalemo	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>65 Orang</b>	<b>88,000,000</b>	
	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	65 Orang	5,000,000		1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	65 Orang	5,000,000	
	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	5,000,000		2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	5,000,000	

	3	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	65 Orang	15,000,000		3	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	65 Orang	15,000,000	
	4	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	65 Orang	10,000,000		4	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	65 Orang	10,000,000	
	5	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	32 Orang	10,000,000		5	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	32 Orang	10,000,000	
	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	65 Orang	5,000,000		6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	65 Orang	5,000,000	
	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65 Orang	10,000,000		7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65 Orang	10,000,000	
	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	65 Orang	10,000,000		8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	65 Orang	10,000,000	
	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1 Orang	3,000,000.00		9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1 Orang	3,000,000.00	
	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 Orang	3,000,000		10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 Orang	3,000,000	

	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	3,000,000		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	3,000,000	
	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1 Orang	3,000,000		12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1 Orang	3,000,000	
	13	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	1 Orang	3,000,000		13	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	1 Orang	3,000,000	
	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Orang	3,000,000		14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Orang	3,000,000	
<b>4</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>20%</b>	<b>599,108,600</b>		<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>20%</b>	<b>599,108,600</b>		
	<b>1</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1 Orang</b>	<b>38,598,600</b>		<b>1</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1 Orang</b>	<b>38,598,600</b>	
	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	1 Orang	15,000,000		1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	1 Orang	15,000,000	
	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	1 Orang	15,000,000		2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	1 Orang	15,000,000	
	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	1 Orang	8,598,600		3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	1 Orang	8,598,600	
	<b>2</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik</b>	<b>9351 KK</b>	<b>560,510,000</b>		<b>2</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik</b>	<b>9351 KK</b>	<b>560,510,000</b>	
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 KK	40,000,000		1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 KK	40,000,000	
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 KK	93,510,000		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 KK	93,510,000	



		3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9351 KK	402,000,000			3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9351 KK	402,000,000		
		4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	25,000,000			4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	25,000,000		
5			Program Penanganan Bencana	Kab. Boalemo	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	212,558,700					Kab. Boalemo	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	212,558,700		
	1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	20%	177,558,700			1		Kab. Boalemo	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	20%	177,558,700		
		1	Penyediaan Makanan	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	70,230,000				1		Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	70,230,000	
		2	Penyediaan Sandang	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	4682 Orang	50,000,000				2		Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	4682 Orang	50,000,000	
		3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Boalemo	Jumlah Tempat Pengungsian	1 Kec.	17,328,700				3		Kab. Boalemo	Jumlah Tempat Pengungsian	1 Kec.	17,328,700	
		4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50 Orang	15,000,000				4		Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50 Orang	15,000,000	
		5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Boalemo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	4682 Orang	25,000,000				5		Kab. Boalemo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	4682 Orang	25,000,000	

2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	7 Kali	35,000,000	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	7 Kali	35,000,000
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3 Kec.	15,000,000		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3 Kec.	15,000,000
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	135 Orang	20,000,000		2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	135 Orang	20,000,000
<b>II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				<b>II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>									
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
6	Program Penataan Desa		Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Tertata secara Representatif	100%	181,555,600	Program Penataan Desa		Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Tertata secara Representatif	100%	181,555,600	
	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	2 Desa	181,555,600	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	2 Desa	181,555,600	
	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	50,000,000		1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	50,000,000
	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	50,000,000		2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	50,000,000
	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3 Desa	25,000,000		3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3 Desa	25,000,000
	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	15,000,000		4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	15,000,000
	5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15,000,000		5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15,000,000
	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	26,555,600		6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	26,555,600

7	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>		<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>2.4%</b>	<b>202,606,000</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>2.4%</b>	<b>202,606,000</b>				
	1	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi	<b>2 Desa</b>	<b>202,606,000</b>	1	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi	<b>2 Desa</b>	<b>202,606,000</b>			
		1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		32,606,000	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32,606,000	
		2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		70,000,000	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70,000,000	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	100,000,000	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	100,000,000				
8	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>479,481,000</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>479,481,000</b>				
	1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>82 Desa</b>	<b>479,481,000</b>	1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>82 Desa</b>	<b>479,481,000</b>			
		1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen		40,000,000	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	40,000,000	
		2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	82 Dokumen		30,000,000	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	82 Dokumen	30,000,000	
		3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	82 Dokumen		35,000,000	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	82 Dokumen	35,000,000	
		4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	82 Dokumen		50,000,000	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	82 Dokumen	50,000,000	
		5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang		40,000,000	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang	40,000,000	
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	82 Laporan	25,000,000	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	82 Laporan	25,000,000				

9	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	82 Laporan	20,000,000	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	82 Laporan	20,000,000	
	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen	20,000,000	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen	20,000,000	
	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	35,000,000	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	35,000,000	
	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	25,000,000	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	25,000,000	
	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Profil Desa	82 Dokumen	50,000,000	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Profil Desa	82 Dokumen	50,000,000	
	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10,000,000	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10,000,000	
	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	10 Dokumen	35,000,000	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	10 Dokumen	35,000,000	
	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	82 Orang	30,000,000	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	82 Orang	30,000,000	
	15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	82 Laporan	19,481,000	15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	82 Laporan	19,481,000	
16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	15,000,000	16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	15,000,000		
9	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>282,129,600</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>282,129,600</b>			

1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						
		Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	1 Lembaga	282,129,600			Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	1 Lembaga	282,129,600		
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga		25,000,000	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	25,000,000
	2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Buah		17,000,000	2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Buah	17,000,000
	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen		30,000,000	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	30,000,000
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	20,000,000	4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	20,000,000		

	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	30,000,000		5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	30,000,000	
	6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	160,129,600		6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	160,129,600	

Tilamuta, 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD**



**Dra. MONRU MOPANGGA**

NIP. 19660930 199702 2 002

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
	Bidang Sosial				
<b>TIDAK ADA USULAN</b>					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
I	Program Penataan Desa	Desa se Kabupaten Boalemo	Persentase Desa yang Tertata secara Representatif		
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa se Kabupaten Boalemo	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik		
	1	Pembangunan Tapal Batas Desa	Kecamatan Wonosari, Desa Mekar Jaya		
	2	Pembangunan pagar Kantor Pemerintah dan Lembaga Desa	Kecamatan Wonosari, Desa Trirukun		
	3	Rehabilitasi Balai Pertemuan Umum Desa	Kecamatan Paguyaman, Desa Mutiara		
	4	Rehab Kantor Desa	Kecamatan Dulupi, Desa Dulupi		

Tilamuta, 2023  
**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD**

  
**Dra. MONRU MOPANGGA**  
 NIP. 19660930 199702 2 002

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
	Bidang Sosial									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Sosial Dan PMD	100%	3,214,778,422	DAU/DAK/ PAD		100%	3,776,057,100
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	Dinas Sosial Dan PMD	100%	1,025,000	DAU/DAK/ PAD		100%	1,025,000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	11 Dokumen	375,000	DAU/DAK/ PAD		8 Dokumen	375,000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	5 Dokumen	375,000	DAU/DAK/ PAD		5 Dokumen	375,000
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	4 Dokumen	275,000	DAU/DAK/ PAD		4 Dokumen	275,000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	100%	2,892,590,032	DAU/DAK/ PAD		100%	3,434,385,010
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	35 Orang	2,891,090,032	DAU/DAK/ PAD		35 Orang	3,432,885,010



	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	18 Laporan	1,500,000			18 Laporan	1,500,000
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>100%</b>	<b>750,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>750,000</b>
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	14 Laporan	750,000	DAU/DAK/PAD		14 Laporan	750,000
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>100%</b>	<b>27,250,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>27,250,000</b>
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Sosial Dan PMD	1 Paket	20,000,000	DAU/DAK/PAD		1 Paket	20,000,000
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Dan PMD	6 Dokumen	1,250,000	DAU/DAK/PAD		6 Dokumen	1,250,000
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Dan PMD	34 Orang	6,000,000	DAU/DAK/PAD		34 Orang	6,000,000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>100%</b>	<b>122,647,090</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>122,647,090</b>
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	6 Paket	7,500,000	DAU/DAK/PAD		6 Paket	7,500,000
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	120 Laporan	115,147,090	DAU/DAK/PAD		120 Laporan	115,147,090
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>100%</b>	<b>122,016,300</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>141,500,000</b>
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	2 unit	105,516,300	DAU/DAK/PAD		2 unit	125,000,000
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	5 Paket	1,500,000	DAU/DAK/PAD		5 Paket	1,500,000
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	3 Unit	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Unit	15,000,000
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>100%</b>	<b>20,500,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>20,500,000</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Dan PMD	4 Laporan	500,000	DAU/DAK/PAD		4 Laporan	500,000

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	3 Laporan	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Laporan	15,000,000
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	12 Laporan	5,000,000	DAU/DAK/PAD		12 Laporan	5,000,000
	8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik</b>	<b>Dinas Sosial Dan PMD</b>	<b>100%</b>	<b>28,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>28,000,000</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Sosial Dan PMD	10 Unit	2,500,000	DAU/DAK/PAD		10 Unit	2,500,000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial Dan PMD	10 Unit	2,500,000	DAU/DAK/PAD		10 Unit	2,500,000
	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Sosial Dan PMD	15 Buah	1,500,000	DAU/DAK/PAD		15 Buah	1,500,000
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial Dan PMD	15 Unit	1,500,000	DAU/DAK/PAD		15 Unit	1,500,000
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Sosial Dan PMD	2 Unit	20,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Unit	20,000,000
2	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>100%</b>	<b>77,374,700</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>78,454,300</b>
	1	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>
	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	189 Keluarga	10,000,000	DAU/DAK/PAD		189 Keluarga	10,000,000
	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	3 Keluarga	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Keluarga	15,000,000
	2	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>10 Kali</b>	<b>2,374,700</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>10 Kali</b>	<b>3,454,300</b>
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boalemo	10 Dok.	2,374,700	DAU/DAK/PAD		10 Dok.	3,454,300

1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	2 Kali	50,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Kali	50,000,000
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	7 Kec.	2 Lembaga	50,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Lembaga	50,000,000
3	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Desa se Kab. Boalemo	40%	252,047,450	DAU/DAK/PAD		60%	257,209,150
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Desa se Kab. Boalemo	34 Orang	167,047,450	DAU/DAK/PAD		51 Orang	169,209,150
	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Desa se Kab. Boalemo	34 Orang	20,400,000	DAU/DAK/PAD		51 Orang	15,400,000
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Desa se Kab. Boalemo	34 Orang	15,147,450	DAU/DAK/PAD		51 Orang	17,309,150
	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Desa se Kab. Boalemo	65 Orang	22,000,000	DAU/DAK/PAD		97 Orang	12,000,000
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	34 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		51 Orang	10,000,000
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	34 Orang	17,500,000	DAU/DAK/PAD		51 Orang	17,500,000
	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	34 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		51 Orang	54,000,000
	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Desa se Kab. Boalemo	20 Orang	7,500,000	DAU/DAK/PAD		30 Orang	4,500,000
	8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	8 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		12 Orang	5,000,000
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	4 Orang	5,500,000	DAU/DAK/PAD		6 Orang	2,500,000	

	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	14,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	14,000,000
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	10,000,000
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	4 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		6 Orang	7,000,000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>130 Orang</b>	<b>85,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>195 Orang</b>	<b>88,000,000</b>
	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	130 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		195 Orang	5,000,000
	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	5,000,000
	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Desa se Kab. Boalemo	130 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		195 Orang	15,000,000
	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	Desa se Kab. Boalemo	130 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		195 Orang	10,000,000
	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Desa se Kab. Boalemo	65 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		97 Orang	10,000,000
	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Desa se Kab. Boalemo	130 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		195 Orang	5,000,000
	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	130 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		195 Orang	10,000,000
	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Desa se Kab. Boalemo	130 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		195 Orang	10,000,000
	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	3,000,000.00	DAU/DAK/PAD		3 Orang	3,000,000.00

	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	3,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	3,000,000
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	2,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	3,000,000
	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	2,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	3,000,000
	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	2 Orang	2,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	3,000,000
	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	3 Dokumen	3,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Dokumen	3,000,000
<b>4</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>40%</b>	<b>123,505,628</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>60%</b>	<b>609,224,350</b>
	<b>1</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>2 Orang</b>	<b>38,505,628</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>3 Orang</b>	<b>38,473,858</b>
	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	Kab. Boalemo	2 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	15,000,000
	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	Kab. Boalemo	2 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Orang	15,000,000
	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Kab. Boalemo	2 Orang	8,505,628	DAU/DAK/PAD		3 Orang	8,473,858
	<b>2</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>9351 Keluarga</b>	<b>85,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>9351 Keluarga</b>	<b>570,750,492</b>
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Boalemo	9351 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		9351 Orang	45,245,081
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	9351 Keluarga	20,000,000	DAU/DAK/PAD		9351 Keluarga	98,505,411
	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	9351 Keluarga	30,000,000	DAU/DAK/PAD		9351 Keluarga	402,000,000
	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boalemo	10 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		10 Orang	25,000,000
<b>5</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>100%</b>	<b>95,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>216,147,650</b>

1	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>40%</b>	<b>75,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>60%</b>	<b>181,147,650</b>	
	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Boalemo	4682 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		4682 Orang	70,230,000	
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Boalemo	4682 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		4682 Orang	50,000,000	
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian	Kab. Boalemo	2 Unit	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Unit	20,917,650	
	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Boalemo	50 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		50 Orang	15,000,000	
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Kab. Boalemo	4682 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		4682 Orang	25,000,000	
	<b>2</b>		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>7 Kali</b>	<b>20,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>7 Kali</b>	<b>35,000,000</b>
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boalemo	3 Kampung	10,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Kampung	15,000,000	
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boalemo	135 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		135 Orang	20,000,000	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>										
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>											
6	<b>Program Penataan Desa</b>		<b>Persentase Desa yang Tertata secara Representatif</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>100%</b>	<b>70,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>184,621,100</b>	
	1	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>3 Desa</b>	<b>70,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>5 Desa</b>	<b>184,621,100</b>	
	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa se Kab. Boalemo	2 Desa	20,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Desa	50,000,000	
	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa se Kab. Boalemo	3 Desa	10,000,000	DAU/DAK/PAD		5 Desa	51,000,000	
	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa se Kab. Boalemo	5 Desa	10,000,000	DAU/DAK/PAD		6 Desa	25,000,000	

	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa se Kab. Boalemo	1 Desa	10,000,000	DAU/DAK/PAD		1 Desa	15,000,000
	5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	1 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Laporan	15,000,000
	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Desa se Kab. Boalemo	5 Unit	10,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Unit	28,621,100
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>		<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>4.9%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>7.3%</b>	<b>206,026,900</b>
	<b>1</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>2 Desa</b>	<b>35,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>2 Desa</b>	<b>206,026,900</b>
	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	3 Dokumen	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Dokumen	33,606,011
	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	1 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		1 Dokumen	70,689,344
	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa se Kab. Boalemo	2 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	101,731,545
<b>8</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>100%</b>	<b>195,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>487,576,800</b>
	<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Desa se Kab. Boalemo</b>	<b>82 Desa</b>	<b>195,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>82 Desa</b>	<b>487,576,800</b>
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	20 Dokumen	20,000,000	DAU/DAK/PAD		20 Dokumen	40,000,000
	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa stunting	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	30,000,000
	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	35,000,000
	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa stunting	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	58,095,797
	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa stunting	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Desa se Kab. Boalemo	164 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		164 Orang	40,000,000
	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Laporan	25,000,000
	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Laporan	20,000,000

	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	7 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		7 Dokumen	20,000,000
	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	4 Laporan	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Laporan	35,000,000
	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa se Kab. Boalemo	2 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Laporan	25,000,000
	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	50,000,000
	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	2 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	10,000,000
	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Desa se Kab. Boalemo	10 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		15 Dokumen	35,000,000
	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Desa se Kab. Boalemo	82 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Orang	30,000,000
	15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Laporan	19,481,003
	16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa se Kab. Boalemo	20 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		20 Dokumen	15,000,000
<b>9</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>100%</b>	<b>286,893,300</b>
	<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan</b>	<b>Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>2 Lembaga</b>	<b>40,000,000</b>	<b>DAU/DAK/PAD</b>		<b>2 Lembaga</b>	<b>286,893,300</b>
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat stunting	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Boalemo	5 Lembaga	10,000,000	DAU/DAK/PAD		5 Lembaga	25,000,000
	2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	4 Buah	5,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Buah	19,352,382



3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Boalemo	10 Dokumen	5,000,000	DAU/DAK/PAD		13 Dokumen	30,000,000
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Boalemo	1 Laporan	5,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Laporan	20,000,000
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Boalemo	2 Dokumen	5,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	30,000,000
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	2 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	162,540,918

Tilamuta, 2023

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dra. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002